



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, JUMAT 27-09-2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Salah Pengiriman Warnai Distribusi Logistik Pilkada

Surat Suara Tunggu Persetujuan Desain dari Paslon

SIDOARJO- Meski tahap pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 Sidoarjo masih berlangsung dua bulan lagi, KPU sudah mulai mempersiapkan kebutuhan logistik coblosan.

Sejumlah perangkat sudah mulai terdistribusi ke gudang KPU Sidoarjo. Sebagian lainnya mulai proses pengadaan. Tahap pengiriman logistik tersebut itu sempat diwarnai insiden salah kirim. Dan menjadi catatan dari Bawaslu.

Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adim mengatakan sebanyak 5.502 kotak suara yang dibutuhkan sudah terkirim. Jumlah itu sudah sesuai kebutuhan. Di mana, setiap tempat pemungutan suara (TPS) nantinya bakal dapat dua kotak suara.

Kebutuhan Logistik Utama Pilkada Serentak di Sidoarjo	
Surat Suara	1.516.527 lembar
Kotak Suara	5.502 unit
Bilik suara	10.932 unit

Sumber: KPU Sidoarjo
Grafis: Rizky Janjijawa POS

"Sudah kami simpan di gudang penyimpanan logistik. Tinggal dirakit," katanya.

Selain itu, logistik yang juga sudah disiapkan adalah bilik suara serta surat suara. Untuk logistik yang disebut terakhir, jumlahnya berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 1.479.539 ditambah 2,5 persen.

Namun, pengadaan surat suara masih belum bisa dilakukan. Sebab, KPU harus berkoordinasi terlebih dulu dengan seluruh perwakilan tim pasangan calon (paslon)

kontestan Pilbup, yakni duet Subandi-Mimik Idayana, serta Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo.

Koordinasi tersebut terkait persetujuan desain surat suara yang tengah disiapkan oleh KPU. "Begitu sudah ada persetujuan desainnya, langsung kami cetak dan dikirim ke gudang," katanya.

Di bagian lain, proses distribusi logistik Pilkada di Sidoarjo yang tengah berlangsung diwarnai insiden salah kirim. Di mana, ada logistik yang harusnya dikirim ke gudang di Jalan Erlangga malah terkirim ke kantor KPU di Cemengkalang.

Salah kirim itu sempat mengganggu kegiatan yang berlangsung di kantor itu. Meski tidak berdampak signifikan, insiden ini tetap mendapat catatan dari Bawaslu Sidoarjo. Lembaga pengawas pemilu itu meminta masalah ini jadi bahan evaluasi. (uzi/ris)



PADAT: Seperti inilah kepadatan kendaraan di area parkir RSUD R.T. Notopuro. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari.

Lahan Parkir Dikeluhkan, RSUD Bangun Gedung Baru

SURABAYA- Meski sudah menyanggah status Rumah Sakit Kelas A, ada satu persoalan di RSUD R.T. Notopuro yang hingga kini masih sulit diurai, yakni parkir. Sampai saat ini, daya tampung kendaraan yang bisa masuk ke rumah sakit milik Pemkab itu masih minim.

Setelah sekian lama jadi keluhan, problem ini akhirnya ada solusi. Ini setelah pengelola

RS yang dulunya bernama RSUD Sidoarjo itu segera mendirikan bangunan khusus parkir baru. "Untuk rancangannya sudah selesai. Ditentukan akan mulai dibangun pada awal 2025," kata Direktur RSUD R.T. Notopuro dr. Atok Irawan, kemarin.

Sesuai rancangan desain yang telah selesai, akan dibuat area khusus parkir bertantai dua di area depan RSUD. Nantinya

parkiran itu juga terhubung kelantai satu dan dua Gedung Pelayanan Terpadu (GPT).

Agar pembangunan area parkir ini bisa segera dimulai, tahap pelaksanaan proyek itu sudah dimulai. Di mana, lelang perencanaan dimulai bulan depan. Sedangkan lelang pelaksanaan konstruksi digelar awal tahun.

Untuk membangun fasilitas ini, RSUD R. T. Notopuro

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 Miliar. "Sumber dananya diambilkan dari BLUD (badan layanan usaha daerah)," tuturnya.

Jika selesai, diperkirakan parkir baru itu bisa menampung hingga 1.700 kendaraan roda empat. Bandingkan dengan saat ini yang hanya bisa menampung ratusan kendaraan. Saat ini, lahan parkir mobil di RSUD R. T. Notopuro hanya

bisa menampung ratusan kendaraan saja. Menurut dokter spesialis paru itu, parkir dua lantai itu bisa menampung sekitar 1.700 mobil.

Di sisi lain, Atok menambahkan, saat ini pembangunan Gedung Diagnostik Terpadu (GDT) tengah berlangsung. "Pembuatan kerangka dasar lantai sudah selesai. Tinggal tahap akhir tahun. Semoga sesuai tingkat akhir tahun," jelasnya. (eza/ris)



OPTIMALISASI APBD: Calon bupati Sidoarjo Achmad Amir Aslichin usai deklarasi pilkada damai Selasa (24/9) lalu.



HARI KEDUA: Mimik Idayana (tiga dari kanan) dan Emil berbicara dengan seorang pedagang di Pasar Larangan kemarin (26/9).

Mas Iin Janjikan Penggunaan Mimik Dampingi Emil APBD Efektif untuk Sidoarjo Blusukan Pasar Larangan

SIDOARJO- Memasuki masa kampanye, calon bupati (cabup) nomor urut 2, Achmad Amir Aslichin, memperkuat konsolidasi bersama tim pemenangnya maupun para pendukung.

Tak hanya itu, Mas Iin, sapaan akrabnya, juga memantapkan program kerja intinya yang ditawarkan kepada publik Sidoarjo. Salah satunya adalah optimalisasi penggunaan APBD Sidoarjo untuk menyelesaikan beragam persoalan kemasyarakatan di Kota Delta.

Secara spesifik, ada sederet sasaran utama yang bakal menjadi prioritas pemanfaatan APBD. "Misalnya

terkait kawasan pemukiman yang kumuh, maka bagaimana bisa tidak kumuh. Misalnya ada kawasan yang kotor, maka bagaimana lewat APBD ditangani agar tidak kotor," katanya.

Demikian pula untuk wilayah-wilayah yang selama ini rawan mengalami genangan saat hujan. "Maka harus disiapkan bagaimana solusinya agar bisa teratasi," kata mantan Anggota DPRD Jatim itu.

Dia menyebut, penggunaan APBD harus bisa diefektifkan. "Kami sudah tahu mana kegiatan yang hanya menghamburkan uang, kurang kena sasaran, dan lainnya," katanya. (uzi/ris)

SIDOARJO- Di hari kedua masa kampanye, calon bupati (cabup) Subandi sudah menyiapkan 14 program kerja Sidoarjo Baik. Salah satunya pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM, serta kredit usaha rakyat daerah (kurda) senilai Rp 50 juta untuk pelaku usaha mikro dan pedagang. "Lewat solusi itu harapannya bisa membantu pedagang dan pelaku usaha di Sidoarjo," katanya.

Terkait penataan pasar, Mimik berjanji akan berusaha mewujudkan di masa mendatang. "Salah satunya perbaikan fasilitas jika ada kerusakan dan lainnya," katanya. (uzi/ris)



NOMOR 2 : Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Achmad Amir Aslichin- Edy Widodo beserta pendukung.

Mas Iin Siap Optimalkan APBD untuk Rakyat

KOTA- Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Achmad Amir Aslichin- Edy Widodo menegaskan komitmen mereka untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) demi menyelesaikan masalah masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Mas Iin sapaan Achmad Amir Aslichin menekankan pentingnya penggunaan APBD untuk program perbaikan dan pembangunan lingkungan.

"Ya yang jelas itu intinya APBD untuk solusi. APBD itu menyelesaikan permasalahan masyarakat, bukan APBD untuk politisi ya," kata Mas Iin, Kamis (26/9/24).

Dia menjelaskan, penggunaan APBD itu tentunya untuk kepentingan umum, di mana ada jalan yang rusak bisa digunakan untuk melakukan perbaikan.

"APBD juga akan dimaksimalkan untuk penanganan banjir, bagaimana mencari solusi supaya surutnya cepat serta mengatasi lingkungan yang kotor," ujarnya.

Menanggapi potensi kampanye hitam, Mas Iin mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dan saling menjaga.

"Masyarakat sekarang sudah cerdas dalam memilah informasi," tegasnya. Ia menambahkan bahwa untuk menjaga integritas, kampanye yang dijalankan akan berlangsung secara santun.

Sebagai pasangan calon nomor urut 2, Mas Iin menekankan pentingnya kompetisi yang positif, dengan mengedepankan prestasi untuk menarik simpati masyarakat.

"Ayo kita berlomba-lomba menunjukkan prestasi kita," katanya mengakhiri. (dik/vga)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Salah Pengiriman Warnai Distribusi Logistik Pilkada

Surat Suara Tunggu Persetujuan Desain dari Paslon

SIDOARJO- Meski tahap pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 Sidoarjo masih berlangsung dua bulan lagi, KPU sudah mulai mempersiapkan kebutuhan logistik coblosan.

Sejumlah perangkat sudah mulai terdistribusi ke gudang KPU Sidoarjo. Sebagian lainnya mulai proses pengadaan. Tahap pengiriman logistik tersebut itu sempat diwarnai insiden salah kirim. Dan menjadi catatan dari Bawaslu.

Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adim mengatakan sebanyak 5.502 kotak suara yang dibutuhkan sudah terkirim. Jumlah itu sudah sesuai kebutuhan. Di mana, setiap tempat pemungutan suara (TPS) nantinya bakal dapat dua kotak suara.



Kebutuhan Logistik Utama Pilkada Serentak di Sidoarjo

■ Surat Suara	1.516.527 lembar
■ Kotak Suara	5.502 unit
■ Bilik suara	10.932 unit

Sumber: KPU Sidoarjo

GRAFIS: RIZKY JANU/JAWA POS

"Sudah kami simpan di gudang penyimpanan logistik. Tinggal dirakit," katanya.

Selain itu, logistik yang juga sudah disiapkan adalah bilik suara serta surat suara. Untuk logistik yang disebut terakhir, jumlahnya berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 1.479.539 ditambah 2,5 persen.

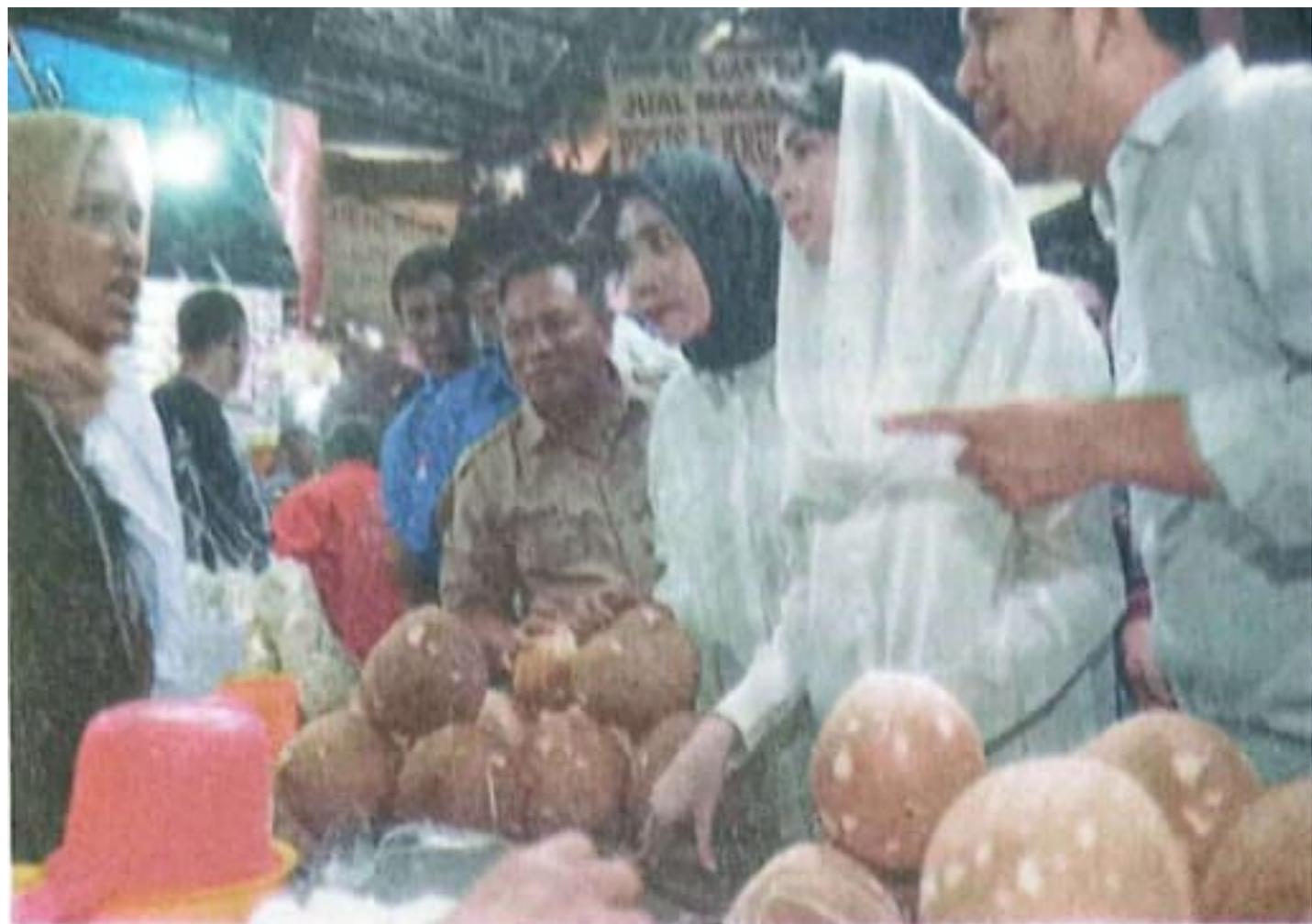
Namun, pengadaan surat suara masih belum bisa dilakukan. Sebab, KPU harus berkoordinasi terlebih dulu dengan seluruh perwakilan tim pasangan calon (paslon)

kontestan Pilbup, yakni duet Subandi-Mimik Idayana, serta Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo.

Koordinasi tersebut terkait persetujuan desain surat suara yang tengah disiapkan oleh KPU. "Begitu sudah ada persetujuan desainnya, langsung kami cetak dan dikirim ke gudang," katanya.

Di bagian lain, proses distribusi logistik Pilkada di Sidoarjo yang tengah berlangsung diwarnai insiden salah kirim. Di mana, ada logistik yang harusnya dikirim ke gudang di Jalan Erlangga malah terkirim ke kantor KPU di Cemengkalang.

Salah kirim itu sempat mengganggu kegiatan yang berlangsung di kantor itu. Meski tidak berdampak signifikan, insiden ini tetap mendapat catatan dari Bawaslu Sidoarjo. Lembaga pengawas pemilu itu meminta masalah ini jadi bahan evaluasi. **(uzi/ris)**



FIRMA ZUHDI/JAWA POS

HARI KEDUA: Mimik Idayana (tiga dari kanan) dan Emil berbincang dengan seorang pedagang di Pasar Larangan kemarin (26/9).

Mimik Dampingi Emil Blusukan Pasar Larangan

SIDOARJO- Di hari kedua masa kampanye, calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 1 Mimik Idayana, berkunjung ke Pasar Larangan. Di sana, dia *blusukan* bersama calon wakil gubernur (cawagub) Emil Elestianto Dardak dan istrinya, Arumi Bachsin.

Ketiganya berinteraksi dengan para pedagang. Ragam keluhan maupun

Mimik menyampaikan bahwa dirinya bersama calon bupati (cabup) Subandi sudah menyiapkan 14 program kerja Sidoarjo Baik. Salah satunya pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM, serta kredit usaha rakyat daerah (kurda) senilai Rp 50 juta untuk pelaku usaha mikro dan pedagang. "Lewat solusi itu harapannya bisa membantu pedagang dan pelaku

harapan disampaikan kepada Mimik maupun Emil. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, perlunya penataan pasar yang lebih baik, hingga perlunya bantuan permodalan.

Kepada para pedagang,

usaha di Sidoarjo," katanya.

Terkait penataan pasar, Mimik berjanji akan berusaha mewujudkannya di masa mendatang. "Salah satunya perbaikan fasilitas jika ada kerusakan dan lainnya," katanya. (uzi/ris)

CS

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



TIM SAE UNTUK JAWA POS

OPTIMALISASI APBD: Calon bupati Sidoarjo Achmad Amir Aslichin usai deklarasi pilkada damai Selasa (24/9) lalu.

Mas lin Janjikan Penggunaan APBD Efektif untuk Sidoarjo

SIDOARJO- Memasuki masa kampanye, calon bupati (cabup) nomor urut 2, Achmad Amir Aslichin, memperkuat konsolidasi bersama tim pemenangannya maupun para pendukung.

terkait kawasan pemukiman yang kumuh, maka bagaimana bisa tidak kumuh. Misalnya ada kawasan yang kotor, maka bagaimana lewat APBD ditangani agar tidak kotor," katanya.

Tak hanya itu, Mas Iin, sapaan akrabnya, juga mematangkan program kerja intinya yang ditawarkan kepada publik Sidoarjo. Salah satunya adalah optimalisasi penggunaan APBD Sidoarjo untuk menyelesaikan beragam persoalan kemasyarakatan di Kota Delta.

Secara spesifik, ada sederet sasaran utama yang bakal menjadi prioritas pemanfaatan APBD. "Misalnya

Demikian pula untuk wilayah-wilayah yang selama ini rawan mengalami genangan saat hujan. "Maka harus disiapkan bagaimana solusinya agar bisa teratasi," kata mantan Anggota DPRD Jatim itu.

Dia menyebut, penggunaan APBD harus bisa diefektifkan. "Kami sudah tahu mana kegiatan yang hanya menghamburkan uang, kurang kena sasaran, dan lainnya," katanya. (uzi/ris)

CS dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



PADAT: Seperti inilah kepadatan kendaraan di area parkir RSUD R.T. Notopuro. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari.

AHMAD REZA/JAWA POS

Lahan Parkir Dikeluhkan, RSUD Bangun Gedung Baru

SURABAYA- Meski sudah menyangkut status Rumah Sakit Kelas A, ada satu persoalan di RSUD R.T. Notopuro yang hingga kini masih sulit diurai, yakni parkir. Sampai saat ini, daya tampung kendaraan yang bisa masuk ke rumah sakit milik Pemkab itu masih minim.

Setelah sekian lama jadi keluhan, problem ini akhirnya ada solusi. Ini setelah pengelola

RS yang dulunya bernama RSUD Sidoarjo itu segera mendirikan bangunan khusus parkir baru. "Untuk rancangannya sudah selesai. Direncanakan akan mulai dibangun pada awal 2025," kata Direktur RSUD R. T. Notopuro dr. Atok Irawan, kemarin.

Sesuai rancangan desain yang telah selesai, akan dibuat area khusus parkir berlantai dua di area depan RSUD. Nantinya

parkiran itu juga terhubung ke lantai satu dan dua Gedung Pelayanan Terpadu (GPT).

Agar pembangunan area parkir itu bisa segera dimulai, tahap pelaksanaan proyek itu sudah dimulai. Di mana, lelang perencanaan dimulai bulan depan. Sedangkan lelang pelaksanaan konstruksi digelar awal tahun.

Untuk membangun fasilitas ini, RSUD R. T. Notopuro

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 Miliar. "Sumber dananya diambilkan dari BLUD (badan layanan usaha daerah)," tuturnya.

Jika selesai, diperkirakan parkir baru itu bisa menampung hingga 1.700 kendaraan roda empat. Bandingkan dengan saat ini yang hanya bisa memuat ratusan kendaraan.

Saat ini, lahan parkir mobil di RSUD R. T. Notopuro hanya

bisa menampung ratusan kendaraan saja. Menurut dokter spesialis paru itu, parkir dua lantai itu bisa menampung sekitar 1.700 mobil.

Di sisi lain, Atok menambahkan, saat ini pembangunan Gedung Diagnostik Terpadu (GDT) tengah berlangsung. "Pembuatan kerangka dasar lima lantai sudah selesai. Tinggal tahap berikutnya. Semoga sesuai target akhir tahun," jelasnya. (eza/ris)

CS dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rutan Masih Jadi Lokasi Rawan Persebaran TBC

SIDOARJO- Tidak salah jika rumah tahanan (rutan) menjadi salah satu kawasan yang rawan terhadap persebaran penyakit menular. Sehingga butuh pendeteksian secara berkala.

Tengara itu terlihat saat tim kesehatan melakukan survey potensi penyakit menular, khususnya TBC, di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya (Ruperbaya) kemarin (26/9).

Dalam survei batuk itu, ditemukan ada sejumlah penghuni rutin yang terdeteksi diduga terjangkit penyakit

menular yang satu ini. Mereka langsung mendapatkan penanganan lanjutan.

Kepala Ruperbaya Amiek Dyah Ambarwati mengungkapkan bahwa survey ini merupakan langkah untuk mencegah penularan penyakit, khususnya TBC di lingkungan rutin. "Ini sesuai dengan SE dari Dirjen Pemasarakatan," tuturnya.

Dalam survey itu, total sebanyak 224 orang penghuni ruperbaya diperiksa. Baik para tahanan maupun narapidana. Mereka diperiksa oleh tim klinik

yang terdiri dari satu dokter, satu perawat, dan dua bidan.

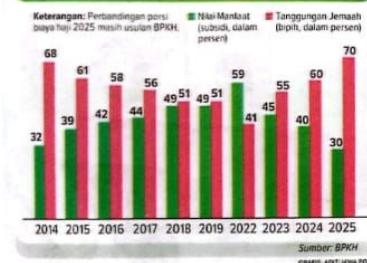
Hasilnya, dari survey itu, sebanyak tiga warga binaan yang ditemukan ada gejala TBC. Karena sudah mengalami batuk dalam jangka waktu lama. "Mereka menjalani pemeriksaan lanjutan oleh petugas klinik. Ini juga bagian dari upaya mencegah penularan penyakit," imbuhnya.

Selain TBC warga binaan juga akan dilakukan pengecekan sejumlah penyakit menular lainnya. (eza/ris)



BERKALA: Secara bergiliran, tim klinik mengecek batuk dari para penghuni ruperbaya dalam pemeriksaan yang berlangsung kemarin (26/9).

Jawa Pos



CJH Harus Siapkan Rp 40 Juta Lagi

- BPKH Usul Subsidi Dikurangi dari 40 Persen Menjadi 30 Persen
- Kepastian Biaya Haji 2025 Menunggu Persetujuan DPR

JAKARTA - Para calon jemaah haji (CJH) yang akan berangkat tahun depan harus siap-siap duit lebih banyak lagi. Sebab, biaya pelunasan haji diperkirakan naik lagi. Itu terjadi jika

usulan pengurangan subsidi (nilai manfaat) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) disetujui DPR. Pemerintah dan DPR memang telah menyiapkan pembahasan biaya haji reguler

2025. Usulan ongkos haji dari Kementerian Agama (Kemendagri) belum muncul. Meski demikian, BPKH telah mengusulkan proporsi tanggungan jemaah yang lebih besar. *Baca CJH... Hal 11*

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

CJH Harus Siapkan Rp 40 Juta Lagi

Sambungan dari hal 1

Hal itulah yang bisa membuat biaya haji tahun depan mengalami kenaikan.

Usulan proporsi tanggungan jemaah dan penggunaan nilai manfaat atau subsidi itu disampaikan anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati. "Memang sampai saat ini kami belum diminta mengusulkan (biaya haji) kira-kira berapa," katanya dalam Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah Forum Jurnalistik Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta kemarin (26/9).

Pejabat yang akrab disapa Lilies itu menuturkan, BPKH sudah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 ke Komisi VIII DPR. RKAT itu, antara lain, terkait dengan distribusi nilai manfaat atau subsidi kepada seluruh jemaah yang antri. Nilainya sebesar Rp 4,4 triliun dan didistribusikan melalui rekening virtual setiap jemaah.

Lilies menjelaskan, komposisi atau pembagian biaya haji usulan BPKH adalah 70:30. Maksudnya, 70 persen biaya haji ditanggung jemaah dan 30 persen ditang-

gung oleh nilai manfaat atau sering disebut subsidi.

"Kalau (proporsi) tahun ini kan 60:40," katanya. Maksudnya adalah 60 persen biaya haji ditanggung jemaah. Lalu sisanya 40 persen ditambal oleh nilai manfaat. Jadi, dari total rata-rata biaya haji 2024 yang ditetapkan Rp 93,4 juta, jemaah menanggung Rp 56 juta. Karena sudah membayar uang muka Rp 25 juta, jemaah dibebani biaya pelunasan Rp 31 juta per orang. Sisanya sebesar Rp 37,3 juta ditutup oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji BPKH.

Jawa Pos membuat simulasi perhitungan berdasar proporsi yang diusulkan BPKH, yakni 70:30. Simulasi menggunakan asumsi biaya haji 2025 sama dengan 2024, yakni Rp 93,4 juta.

Maka, dana yang harus dibayar setiap CJH menjadi Rp 65 juta. Naik Rp 9 juta dibanding 2024 yang sebesar Rp 56 juta. Karena setiap CJH sudah membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta, berarti kurang Rp 40 juta. Nah, uang sebesar itulah yang harus disiapkan oleh masing-masing CJH untuk pelunasan.

"Sebenarnya usulan (70:30) ini sama dengan usulan 2024," tuturnya. Tetapi, setelah melewati pembahasan yang melibatkan DPR dan Kemenag, terjadi tawar-menawar. Sampai akhirnya diputuskan proporsinya 60 persen beban CJH dan 40 persen beban nilai manfaat.

Namun, Lilies kembali menegaskan bahwa besaran total biaya haji sebagai acuan pembagian tanggungan CJH dan nilai manfaat belum ditetapkan. Namun, dia memperkirakan tidak jauh-jauh dengan usulan biaya haji 2024.

Dia mengungkapkan, pada musim haji 2024, Kemenag mengusulkan rata-rata biaya riil haji Rp 98 jutaan. Kemudian disepakati Rp 93,4 juta. "Menurut perhitungan saya (beban biaya haji tanggungan jemaah) meningkat. Tetapi sedikit," tuturnya.

Pasalnya, dari sejumlah

indikator ekonomi, ada beberapa catatan positif. Antara lain, kurs rupiah terhadap dolar yang sekarang berada di Rp 15 ribuan. Kemudian, inflasi bisa terjaga. Selama tidak ada biaya layanan haji yang mengalami kenaikan signifikan di Arab Saudi, biaya haji tahun depan tidak jauh berbeda dengan ongkos haji tahun ini.

Lilies lantas menyampaikan, BPKH ke depan akan terus meningkatkan alokasi untuk VA. Tujuannya supaya jumlah uang dalam rekening calon jemaah haji mengalami kenaikan signifikan juga. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, beban pelunasan biaya haji oleh jemaah semakin mengecil.

Tahun depan BPKH mendistribusikan nilai manfaat Rp 4,4 triliun kepada sekitar 5 juta jemaah yang antri. Nominal itu meningkat drastis dibandingkan distri-

busi nilai manfaat tahun ini yang sekitar Rp 2,34 triliun. Pendistribusian nilai manfaat itu sudah dijalankan sejak 2018 lalu. Saat itu nilai manfaat yang didistribusikan kepada rekening VA jemaah hanya Rp 790 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Irfan Syaumi Beik menuturkan, perlu ada pengelolaan dana haji yang tepat. Mulai dari aspek investasi sampai dengan pendistribusian hasil manfaatnya. Dengan begitu, dana haji tidak terus tergerus. Jika pengelolaannya tidak tepat, dia khawatir simpanan pokok dana haji ikut tergerus untuk membayar subsidi jemaah yang berangkat di tahun berjalan.

Dia menekankan, yang terpenting, investasi BPKH tetap harus *prudent* karena itu uang masyarakat. (wan/tyo/c17/oni)

Jawa Pos



IST

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

PERSIAPAN: Kotak Suara disimpan di gudang KPU Sidoarjo di Jalan Erlangga

Sejumlah Logistik Pilkada Sudah Tiba di Gudang KPU

KOTA-Logistik untuk Pilkada 2024 telah tiba di gudang KPU Sidoarjo di Jalan Erlangga. Logistik yang diterima mencakup kotak suara dan kabel tis yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada. "Iya, sudah kami terima, saat ini sudah ada di gudang KPU Sidoarjo," ucap Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim, Kamis (26/9).

Dia menjelaskan, saat ini yang sudah tersedia di gudang adalah kabel tis dan kotak suara. Sementara untuk bilik suara masih dalam proses pengiriman dan belum sepenuhnya tersedia. "Total kotak suara yang diterima mencapai 5.502 unit, serta kabel tis sebanyak 32.796 atau setara dengan sembilan koli," jelasnya.

"Sementara itu, untuk surat suara masih dalam proses penyediaan, jumlahnya sesuai dengan Daftar

remini tetap (DRI) ditambah 2,5 persen, selain itu sebanyak 10.932 unit bilik suara juga sedang dipersiapkan untuk mendukung proses pemungutan suara," imbuhnya.

Untuk pendistribusian logistik ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), Fauzan mengungkapkan, pengiriman akan dilakukan setelah

● **Ke Halaman 10**

Sejumlah Logistik...

mendapatkan arahan dari pimpinan. Artinya untuk langkah selanjutnya ia masih menunggu intruksi.

Terkait logistik yang salah alamat pengiriman, Fauzan mengungkapkan, masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari pihak penyedia. Hal itu mengakibatkan kesalahan dalam pengiriman logistik yang seharusnya diterima oleh di gudang menjadi ke kantor

KPU Sidoarjo.

Meski begitu, Fauzan mengakui bahwa KPU juga memiliki tanggung jawab atas insiden tersebut. Sehingga hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi KPU dalam memperbaiki proses logistik ke depannya.

"KPU Sidoarjo berkomitmen untuk memastikan semua logistik tersedia tepat waktu demi kelancaran pelaksanaan Pilkada," pungkasnya. (sai/vga)

CS Dipinda dengan CamScanner



Dampingi Cawagub Jatim Emil Dardak di Pasar, Mimik Idayana Siapkan Program Kredit Usaha untuk Pedagang

CANDI-Hari kedua masa kampanye, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Eliasto Dardak bersama, istri Arumi Bachsin blusukan ke Pasar Larangan, Sidoarjo. Emil didampingi Calon Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, Kamis pagi (26/9/2024).

Di lokasi, Cawagub Jatim Emil dan Cawabup Sidoarjo Mimik Idayana menyapa dan mendengar keluhan dari pedagang. Kedatangan mereka sontak membuat para pedagang dan pembeli Pasar Larangan heboh.

"Eh ada Mas Emil dan Bu Mimik, ayo sini semuanya," teriak salah satu pedagang. Para pedagang langsung menyerobot minta foto bareng dengan Emil Dardak dan Mimik Idayana. Arumi Bachsin dengan senyum indah juga melayani para pedagang yang minta foto bersama.

Setelah selesai meladeni para pedagang, rombongan Emil Dardak dan Mimik Idayana masuk ke dalam Pasar Larangan melalui pintu selatan. Satu persatu pedagang disapa, mulai dari stan sayur-sayuran hingga stand penjual ayam dan daging.

Menurut Emil, dia bersama



HEBOH : Calon Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama para pendukung di Pasar Larangan.

Khofifah Indar Parawansa selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim rutin mengunjungi pasar-pasar. Tujuannya untuk mengawasi dan memastikan langsung stabilitas harga.

"Kalau harga naik pedagang khawatir, karena pembeli jadi lesu. Alhamdulillah di Jawa Timur stabil, karena kami selalu intens berkomunikasi dengan pedagang, petani dan juga konsumen berjalan baik," katanya.

Sementara itu, Calon Wakil

Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana sudah menyiapkan 14 program kerja Sidoarjo Baik. Salah satunya kredit usaha rakyat daerah (kurda) Rp 50 juta untuk usaha mikro dan pedagang.

"Melalui Kurda bunga rendah 0,2 persen per-tahun, kami harapkan bisa memberikan pemerataan bagi pedagang dan pelaku usaha yang ada di Sidoarjo. Kami ingin masyarakat Sidoarjo lebih sejahtera dan lebih baik lagi," ujarnya. (sai/vga)

CS Dipinda dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



NOMOR 2 : Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Achmad Amir Aslichin- Edy Widodo beserta pendukung.

Mas Iin Siap Optimalkan APBD untuk Rakyat

KOTA-Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Achmad Amir Aslichin- Edy Widodo menegaskan komitmen mereka untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) demi menyelesaikan masalah masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Mas Iin sapaan Achmad Amir Aslichin menekankan pentingnya penggunaan APBD untuk program perbaikan dan pembangunan lingkungan.

"Ya yang jelas itu intinya APBD untuk solusi. APBD itu menyelesaikan permasalahan masyarakat, bukan APBD untuk politisi ya," kata Mas Iin, Kamis (26/9/24).

Dia menjelaskan, penggunaan APBD itu tentunya untuk kepentingan umum, di mana ada jalan yang rusak bisa digunakan untuk melakukan perbaikan.

"APBD juga akan dimaksimalkan untuk penanganan banjir, bagaimana mencari solusi supaya surutnya cepat serta mengatasi lingkungan yang kotor," ujarnya.

Menanggapi potensi kampanye hitam, Mas Iin mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dan saling menjaga.

"Masyarakat sekarang sudah cerdas dalam memilah informasi," tegasnya. Ia menambahkan bahwa untuk menjaga integritas, kampanye yang dijalankan akan berlangsung secara santun.

Sebagai pasangan calon nomor urut 2, Mas Iin menekankan pentingnya kompetisi yang positif, dengan mengedepankan prestasi untuk menarik simpati masyarakat.

"Ayo kita berlomba-lomba menunjukkan prestasi kita," katanya mengakhiri. (dik/vga)

CS Digital dengan Calculator



Bea Cukai-Satpol PP Gencarkan Razia dan Sosialisasi Sanksi Pelanggar

Sidoarjo, Memorandum

Petugas gabungan Bea Cukai dan Satpol PP Sidoarjo operasi rokok ilegal. Razia dilakukan di Pasar Porong dan Krembung, Kamis (26/9).

Humas Bea Cukai Sidoarjo Ngu-rah Rai mengatakan, operasi seka-ligus sosialisasi dilakukan karena maraknya peredaran rokok ilegal, khususnya di pasar-pasar tradisional. "Hari ini giat sosialisasi rokok ilegal di dua tempat, yakni Pasar Porong dan Pasar Krembung. Semua kios yang menjual rokok ilegal kita beri stiker," ujarnya.

Semua pedagang rokok, lanjut dia, saat didatangi petugas *welcome*. "Karena sebelumnya sudah ada tim kami dari Bea Cukai Kakanwil Jatim 1 melakukan sosialisasi," jelasnya.

Dalam operasi kemarin, tim gabungan belum menemukan rokok ilegal. Namun Bea Cukai akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait rokok ilegal. "Biar masyarakat paham hukuman yang akan mereka akan

dapatkan kalau menjual rokok ilegal," tuturnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, penjual rokok ilegal hukumannya 1 sampai 8 tahun, dengan denda 2 sampai 20 kali nilai cukai. "Ini yang terus kita sosialisasikan kepada masyarakat," tandasnya.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Sidoarjo Puguh Karyanto menambahkan, operasi pasar rokok ilegal ini sudah 14 kali digelar pihaknya bersama Bea Cukai. Rencananya, operasi pasar ini digelar 25 kali dalam satu tahun.

Hasil evaluasi sementara, masyarakat sekarang berani melanggar, dalam arti menjual rokok ilegal. Penjualan juga kian marak disebabkan kondisi perekonomian yang memburuk dan melambungnya harga rokok bercukai. Akhirnya banyak yang menjual rokok tanpa cukai dan banyak pula yang membeli rokok tanpa cukai. (adv/sud/kri/jok/epe)



MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Tidak Boleh ke jalur cepat? Berikut Alasannya

SIDOARJO - Keselamatan berkendara merupakan prioritas utama dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman. Berkendara dengan sepeda motor memang menyenangkan apalagi berkendara di saat waktu libur. Tetapi perlu diperhatikan saat berkendara sepeda motor ada baiknya menggunakan jalur lambat bukan di jalur cepat.

Jalur lambat biasanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak dengan kecepatan lebih rendah, seperti sepeda motor, sepeda, dan kendaraan berat. Namun, masih banyak pengendara yang belum memahami tata cara berkendara di jalur lambat yang baik dan benar. Larangan ini tentu saja memiliki alasan yang jelas. Seperti :

1. Aturan Lalu Lintas yang Berlaku

Sebagian besar daerah memiliki aturan lalu lintas yang secara khusus mewajibkan sepeda motor untuk berada di jalur lambat. Hal ini dibuat demi keamanan bersama dan pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan tentu saja melanggar regulasi pemerintah jika pengendara sepeda motor tetepa menggunakan



Saat berkendara sepeda motor ada baiknya menggunakan jalur lambat bukan di jalur cepat.

jalur cepat.

2. Sepeda motor memiliki banyak keterbatasan di bandingkan dengan mobil mulai dari kestabilan dan

juga kecepatan, oleh karena itu bila motor masuk kedalam jalur cepat dapat menghambat lalu lintas di jalur cepat dan berpotensi gesekan

dengan pengendara mobil.

3. Tapi motor juga bisa kencang? Nah kembali ke point 1, sepeda motor merupakan kendaraan yang

tidak stabil karena memerlukan keseimbangan untuk berkendara sepeda motor, sedikit gangguan seperti hembusan angin, batu kerikil dapat mengganggu keseimbangan sepeda motor. Misalkan kita melaju dengan kecepatan 60 kemudian ada bus yang menyalip kita dengan kecepatan 80 km/jam. Hembusan angin yang dihasilkan oleh proses bus menyalip kita dapat mengganggu keseimbangan sepeda motor.

4. Kendaraan sepeda motor menjadi kendaraan bermotor paling kecil di jalur cepat, sehingga berpotensi tidak atau terlambat teridentifikasi oleh kendaraan lain seperti mobil, bahkan bus atau truck yang memiliki banyak area blindspot.

"Penggunaan jalur lambat yang sesuai dengan peruntukannya tidak hanya meningkatkan keselamatan pribadi tetapi juga kenyamanan pengguna jalan lainnya. Ingat selalu #cari_aman saat berkendara di jalan seperti slogan berkendara dari Honda" kata Suhani, marketing Communication & development Division Head MPM Honda Jatim. • Imm

DUTA



LOETFI/DUTA

Si Humas Polresta Sidoarjo dan jurnalis media online di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kamis(26/9/24)

Ajak Jurnalis

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Cegah Hoak

SIDOARJO - Memasuki masa kampanye Pilkada 2024, Si Humas Polresta Sidoarjo mengajak jurnalis media online di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mewujudkan kondusifitas kamtibmas.

Pertemuan tersebut berlangsung Kamis (26/9/24) di ruang Media Center Polresta Sidoarjo. Bertajuk silaturahmi Media Piramida, dipimpin Kasi Humas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono dengan mengajak diskusi sejumlah jurnalis dari berbagai media online.

Iptu Tri Novi Handono menyampaikan, memasuki tahap masa kampanye Pilkada serentak 2024 mulai 25 September 2024- 23 November 2024, dinamika dan suhu politik tentunya mulai naik. Dari sisi pemberitaan diharapkan dapat menjadi cooling system, sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Berita yang berimbang, berdasarkan fakta dan tidak mengandung informasi hoak tentu dapat menjaga situasi kamtibmas di masa kampanye Pilkada serentak 2024,” pesannya.

Kecepatan pemberitaan media online menjadi sektor penting dalam penyebaran informasi sesuai fakta. Humas Polresta Sidoarjo menurut Iptu Tri Novi juga dengan terbuka membantu informasi yang dibutuhkan awak media.

Pada kesempatan ini, para jurnalis online juga mengapresiasi sinergitas yang terjalin

dengan baik antara pihak kepolisian dengan media, terutama dalam menangkal informasi hoaks agar terus rutin dilakukan. Kemudian soal transparansi maupun keterbukaan informasi agar mudah diperoleh pihak media. ● **Loe**

CS Copyright © 2015-2016

DUTA

Pimpin Apel, Pjs Bupati Isa Anshori Minta ASN Jaga Netralitas di Pilkada 2024

SIDOARJO (BM) - Dihari pertama menjadi Pjs Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori, langsung memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan Kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (25/9).

Apel pagi tersebut diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati, para Asisten Pemkab Sidoarjo, dan seluruh pegawai Sekretariat Daerah. Dalam apel tersebut, Pjs Bupati Sidoarjo, Isa Anshori, mengingatkan untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 27 November mendatang.

Dia meminta, ASN harus menjaga sikap profesional, tidak memihak serta menjaga integritas demi terciptanya Pilkada Sidoarjo yang kondusif dan damai. "Netralitas ASN merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan pilkada

yang aman serta lancar. ASN harus bersikap objektif dan tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun," ujar Isa Anshori.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Pemprov Jatim itu, juga mengajak semua ASN untuk bekerja keras, ikhlas, dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam dua bulan ke depan. Hal ini nilainya penting dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Disamping itu, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara optimal, tidak boleh terganggu, warga kota delta harus diberikan pelayanan yang terbaik. "Saya mengajak ASN untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Saya harap kerja ikhlas ini dapat ditanamkan dan menjadi bagian dari semangat kerja

seluruh ASN di Sidoarjo," tegasnya.

Setelah melaksanakan apel pagi, Pjs Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori, melakukan kunjungan ke berbagai ruangan di Kantor Sekretariat Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat setiap bidang yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah dan memastikan operasional berjalan dengan baik.

Setelah berkeliling, Pjs Bupati mengadakan kegiatan coffee morning bersama seluruh jajaran OPD dan Camat Kabupaten Sidoarjo di ruang Ops Room. Acara ini digunakan sebagai momen untuk membahas hasil kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD dan Forkopimka, serta mengevaluasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pelayanan publik. (udi)



APEL ASN: Pjs Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori, saat memimpin apel ASN di Kantor Bupati Sidoarjo.

CS | Copyright © 2013



EDUKASI: Guru di Sidoarjo diedukasi untuk cegah perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar.

BM1ST

Polisi Gandeng Guru Cegah Perundungan di Kalangan Pelajar

SIDOARJO (BM) - Polresta Sidoarjo melakukan sejumlah antisipasi untuk mencegah perundungan di kalangan pelajar. Salah satunya, dengan menggandeng para guru.

Di hadapan guru-guru SMP se-Kabupaten Sidoarjo, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo Iptu Utun Utami mengajak peran bersama mencegah perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar.

Edukasi dari Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo ini disampaikan dalam seminar yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Selasa (24/9/2024) di Aula SDK Petra 12 Sidoarjo.

Utun Utami mengatakan, melalui diskusi ini, dibahas langkah pencegahan soal maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Serta bagaimana perlindungan terhadap korban maupun hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku," kata Utun usai kegiatan, Rabu (25/9).

Utun menjelaskan, pihaknya bersama stakeholder terkait serius dalam menangani sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Tentu peran serta keluarga maupun lembaga pendidikan pun turut terlibat di dalam pencegahan kasus serupa agar tidak terjadi. Sebab itu, perlu komitmen bersama guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak," jelas Utun.

"Selain berperan aktif dalam penegakan hukum, mengedukasi masyarakat terkait bahaya tindak kekerasan dan pelecehan seksual dalam rumah tangga maupun anak,

Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo juga telah membentuk Ruang Pelayanan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan Anak yang di dalamnya juga melibatkan stakeholder terkait," imbuh Utun.

Ia menambahkan, dengan adanya Ruang Pelayanan Terpadu di Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, menurutnya bila ada masyarakat yang menjadi korban maupun sebagai saksi adanya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada perempuan dan anak, jangan takut melaporkan kepada pihak kepolisian.

"Masyarakat kamiimbau untuk jangan takut lapor pada Polisi bila ada kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Karena kami selalu siap berikan perlindungan, kepastian hukum sehingga kasus dapat segera kami selesaikan," tandas Utun. (udi)

CS Membaca dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Masuki Masa Kampanye, Bawaslu Sidoarjo Sidak Kesiapan Logistik Pilkada Serentak 2024

by RadarJatim — 26 September 2024 in Politik

0



Fathur Rohman, Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Sidoarjo saat melakukan sidak ke gudang penyimpanan logistik milik KPU Sidoarjo.



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sudah memasuki masa kampanye untuk pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup), Calon Walikota-Calon Wakil Walikota (Cawali-Cawawali) dan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Pelaksanaan kampanye akan dilaksanakan pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan logistik milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo di jalan Erlangga, Rabu (25/09/2024).

Fathur Rohman S.Kom, MM, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan (Kordiv SDMO dan Diklat) Bawaslu Sidoarjo yang didampingi oleh staf dari KPU Sidoarjo mengecek satu persatu barang yang sudah datang, seperti kabel ties dan kotak suara.

“Alhamdulillah dari sidak kali ini, tidak ditemukan barang rusak atau cacat. Semua masih dalam kondisi baik,” katanya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Fathur sangat menyayangkan terjadinya miss koordinasi antara KPU Sidoarjo dengan PT SPM selaku penyedia logistik kabel ties yang seharusnya langsung dikirim ke gudang penyimpanan di jalan Erlangga.

Namun, ternyata kabel ties tersebut dikirim ke Kantor KPU Sidoarjo di jalan raya Cemengkalang pada hari Senin (23/09/2024) atau saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Cabup-Cawabup Sidoarjo.

“Datangnya logistik kabel ties yang dikirim penyedia ini mendadak. Tidak ada koordinasi yang baik antara penyedia dengan KPU Sidoarjo. Kami berharap kedepan lebih profesional lagi,” tegasnya.



Mantan Wakil Bendahara Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur (Jatim) itu juga ingin memastikan kebutuhan logistik, baik kotak suara, bilik suara dan lainnya tidak ada kendala pada saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 nanti.

“Kami ingin semua kebutuhan logistik untuk Pilkada ini benar-benar tidak ada kendala, barangnya tidak ada yang rusak. Alhamdulillah, kotak suara tadi saya lihat sudah bagus dan sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya proses pengiriman dan penyortiran logistik, seperti bilik suara maupun surat suara berjalan dengan lancar. KPU Sidoarjo juga harus melakukan koordinasi dengan pihak penyedia supaya tidak terjadi keterlambatan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Rencanya hari ini, bilik suara akan dikirim tapi kemudian dibatalkan,” ungkapnya.

Saat ini, logistik Pilkada serentak yang sudah tiba di gudang KPU Sidoarjo ialah kabel ties sebanyak 32.796 atau 9 koli dan kotak suara sebanyak 5.502 buah.

(mams)



Cawagub Jatim Emil Dardak dan Cawabup Mimik Bikin Heboh Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo

Tayang: Kamis, 26 September 2024 11:19 WIB

Penulis: [M Taufik](#) | Editor: [Titis Jati Permata](#)



Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama istrinya Arumi Bachsin dan Calon Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat blusukan ke Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/9/2024).

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Pasar Larangan mendadak heboh, Kamis (26/9/2024) pagi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Para pedagang dan pengunjung salah satu pasar tradisional terbesar di Sidoarjo itu dihebohkan dengan kedatangan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sidoarjo.

Mereka adalah Cawagub Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bersama istrinya Arumi Bachsin, yang datang ke pasar bersama Cawabup Sidoarjo Mimik Idayana.

Emil merupakan Cawabup dari Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sedangkan Mimik Idayana adalah Cawabup dari Calon Bupati Subandi.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Tiba di Pasar Larangan, mereka langsung menyapa para pedagang dan pengunjung yang ada.

Sesekali Cawagub dan Cawabup itu juga menanyakan harga barang yang dijual oleh beberapa pedagang yang ada di pasar itu.

Mereka juga terlihat mendengarkan beberapa keluhan dari pedagang.

“Eh ada Mas Emil dan Bu Mimik, ayo sini semuanya,” teriak seorang pedagang saat melihat dua calon itu masuk ke kawasan pasar.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sejurus kemudian, para Pedagang langsung menyerobot minta foto bareng dengan Emil Dardak dan Mimik Idayana.

Arumi Bachsin yang mendampingi suaminya juga berulang kali melayani para pedagang dan pengunjung pasar yang minta foto bersama.

Blusukan berlanjut ke beberapa sudut pasar. Sambil menyapa pedagang, rombongan Emil Dardak dan Mimik Idayana masuk ke dalam Pasar Larangan melalui pintu selatan, terus berjalan sampai ke dalam.

SURYA
Sidoarjo News

Satu persatu pedagang disapa, mulai dari stan sayur-sayuran hingga stand penjual ayam dan daging.

Menurut Emil, dia bersama Khofifah Indar Parawansa selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim rutin mengunjungi pasar-pasar.

Tujuannya untuk mengawasi dan memastikan langsung stabilitas harga.